

Implementasi Perda No 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan Di Kecamatan Sukajadi Tahun 2010

Oleh : Ferry Hendersen

Email : ferihendersen@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Fisip Universitas Riau

Abstract

The rapid growth of the city of Pekanbaru meghadirkan positive thing for Revenue, one of which is a cleaning levy. Regulations governing the levy hygiene should really be implemented as well. But the fact is there are still areas that have a realization that levy very low hygiene of the set target.

Of research by the author, it can be concluded that the implementation of the Regional Regulation No. 4 of 2000 has not been implemented properly. This is seen from the public consciousness in paying fees are still very rendah. untuk hygiene was necessary improvements in its implementation.

Keyword : Implementasi Kebijakan, Retribusi Kebersihan, Peraturan Daerah no 4 Tahun 2000

Implementasi Perda No 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan Di Kecamatan Sukajadi Tahun 2010

1.1 Latar Belakang

Pemerintah kota pekanbaru terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, dan salah satunya berasal dari penerimaan retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah yang belum tergarap secara maksimal adalah retribusi kebersihan. Tingkat kontribusi retribusi kebersihan dalam peningkatan PAD kota pekanbaru masih sangat rendah. Retribusi kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi kebersihan akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam pemenuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hanya saja pengelolaan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru belum dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga belum dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi penerimaan daerah Kota Pekanbaru

Sebagai salah satu kecamatan yang ada di pekanbaru dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, seharusnya Kecamatan Sukajadi lebih mampu memaksimalkan PAD kota Pekanbaru, dengan cara mengimplementasikan perda No 4 tahun 2000 dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Perda No 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan di kecamatan Sukajadi Tahun 2010.**

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan di Kecamatan Sukajadi pada tahun 2010 ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan di Kecamatan Sukajadi pada tahun 2010 ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Kebersihan di Kecamatan Sukajadi pada tahun 2010
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Kebersihan di Kecamatan Sukajadi pada tahun 2010

1.4 Kerangka Teori

menurut Jones (1991:296) aktifitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, yaitu :

- a. Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan kebijakan dapat berjalan

b. Interpretasi

Menafsirkan agar kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan

c. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan kebijakan

1.5 METODE PENELITIAN

1.5. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan teknik wawancara. Key informan dalam penelitian ini adalah Lurah Simpang Baru, Kepala PPK dan masyarakat Kelurahan Simpang Baru.

2. Kebijakan

Kebijakan Retribusi Kebersihan diatur dalam Perda no 4 tahun 2000 yang terdiri dari Pengangkutan sampah dan penarikan retribusi. Dimana memberikan ketentuan pokok pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah untuk melaksanakan pemungutan retribusi sekaligus menetapkan sistem prosedur umum retribusi daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 sendiri di buat dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Organisasi dan Sumberdaya pelaksanaan Teknis

Salah satu sumberdaya yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas, demikian pula dalam penyelenggaraan tugas pada kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitasnya juga.

4. Pendataan wajib retribusi kebersihan

Dalam hal pemungutan retribusi kebersihan, sebelum melakukan pemungutan retribusi tentunya Pemerintah Kecamatan Sukajadi terlebih dahulu mendata agar mempermudah dalam hal pemungutan. Dalam pendataan tersebut yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sukajadi ialah mendata jumlah kepala keluarga, agar mempermudah dalam mempersiapkan keperluan untuk melakukan pengangkutan sampah, berupa armada yang dibutuhkan dan berapa petugas yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan retribusi

5. Sosialisasi wajib retribusi

Pelaksanaan sosialisasi sangat penting di lakukan oleh pihak Kecamatan untuk sehingga masyarakat mengetahui manfaat tentang retribusi kebersihan

6. Mekanisme pemungutan

Melakukan pemungutan tentunya dengan menggunakan tatacara tertentu, dalam hal ini pemerintah kecamatan Sukajadi melakukan pemungutan langsung maupun pemungutan tidak langsung. Yang dimaksud pemungutan langsung adalah pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sukajadi. Pemungutan ini dilakukan di jalan kecamatan atau bangunan besar lainnya di pinggir jalan. Sedangkan pemungutan tidak langsung adalah pemungutan yang dilakukan oleh pihak kelurahan yang mendapat pelimpahan wewenang oleh Kecamatan yang mana dilingkungan Kelurahan tersebut

7.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Sukajadi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda no 4 tahun 2000 Retribusi Kebersihan sampah masih belum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan agar pelaksanaan Implementasi perda retribusi kebersihan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal penerimaan retribusi kebersihan, baik dari tingkat sosialisasi sampai tingkat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan terhadap masyarakat

Saran

Dari rangkaian proses penelitian ini setelah dilakukan proses analisis data sebagaimana yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Implementasi Perda no 4 tahun 2000 perlu didukung oleh semua pihak, baik itu dari pihak Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW sehingga dapat berjalan dengan baik
2. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan dan kelurahan untuk dapat melakukan pembagian lokasi pemungutan dengan jelas, sehingga tidak tumpang tindih dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan yang ada dalam Perda no 4 Tahun 2000 tentang retribusi kebersihan, sehingga masyarakat tidak menilai pembayaran retribusi dinilai mengada-ada
3. Kepada Pemerintah Kecamatan Sukajadi melakukan peningkatan sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar- dasar kebijakan publik*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Dharma Setyawan Salam, 2004. *Otonomi Daerah*, Jakarta, Djambatan.

- Dunn, W.N. 2003. Pengantar analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada university press, Yogyakarta
- Guritno Mangkoesoebroto, 1999. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta, FE UGM.
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Nick Devas, 1995, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, UI Press.
- O'Jones, Charles, 1991, Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta, Rajawali Press.
- Marihot P. Siahaan, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Riwu Kaho, 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* , Jakarta , Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sujianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Grasindo Cipta. Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, ANDI.
- Tangkilisan, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta.

Dokumentasi:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang *Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru*

Peraturan Daerah Pekanbaru nomor 03 tahun 2003 Tentang *Wilayah Kecamatan Sukajadi*

Internet :

<http://www.pekanbaru.go.id>

